

**PENGARUH AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN
AKUNTABILITAS TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUAL PADA KANTOR CAMAT
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**



Diajukan Oleh:

APITA OKTA PIANA

NPM. 20.01.12.0080

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TRIDINANTI


2024

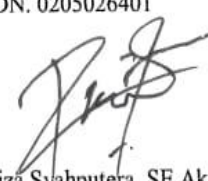
UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Apita Okta Piana
Nomor Pokok : 2001120080
Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata I
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual Pada Kantor Camat Kota Palembang

Pembimbing Skripsi

Tanggal 2 - 09 - 2024 Pembimbing I :  Dr. Msy. Mikial, SE.,M.Si.Ak.CA.CSRS
NIDN. 0205026401

Tanggal 26 - 03 - 2024 Pembimbing II :  Riza Syahputera, SE.Ak.CA.CPAI,M.Ak
NIDN. 0224108301



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Tanggal 2 - 09 - 2024

Dr. Msy. Mikial, SE.,M.Si.Ak.CA.CSRS
NIDN. 0205026401

Ketua Program Studi

Tanggal 1 - 09 - 2024


Meti Zuliyana, SE, M.Si, Ak. CA,CSRS
NIDN. 0205056701

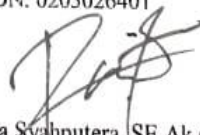
UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Apita Okta Piana
Nomor Pokok : 2001120080
Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual Pada Kantor Camat Kota Palembang

Penguji Skripsi

Tanggal 2-09-2024. Ketua Penguji :  Dr. Msy. Mikial, SE., M.Si.Ak.CA.CSRS
NIDN. 0205026401

Tanggal 26-03-2024. Penguji I :  Riza Syahputera, SE.Ak.CA.CPAI.M.Ak
NIDN. 0224108301

Tanggal 1-09-2024. Penguji II :  Febransyah, SE., MM
NIDN. 0203026601

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Tanggal 2-09-2024




Dr. Msy. Mikial, SE., M.Si.Ak.CA.CSRS
NIDN. 0205026401

Ketua Program Studi
Tanggal 1-09-2024



Meti Zuliyana, SE., M.Si., Ak. CA.CSRS
NIDN. 0205056701

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Apita Okta Piana

NPM : 2001120080

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan dari karya orain lain.

Apabila ditemukan dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dengan segala konsekuensinya.

Palembang, Maret 2024



Apita Okta Piana

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Semua orang selalu kelihatan fokus pada hasil yang gagal, tanpa pernah sadar bahwa proses yang dijalani seseorang itu tidak pernah mudah. Maka, jangan pernah takut gagal, biarkan gagal datang bertubi-tubi sampai dia bosan dan pergi meninggalkan

Pelan-pelan saja, lambat bukan berarti tertinggal, cepat bukan berarti hebat.

Tidak perlu menyamai kecepatan kita dengan orang lain

Ketika segalanya menjadi sulit, berhentilah sejenak dan lihat ke belakang dan lihat seberapa jauh kamu telah melangkah (Kim Taehyung – BTS)

Kupersembahkan Kepada:

- Emak dan Bapak tercinta**
- Masku tersayang**
- Para pendidik yang kuhormati**
- Teman-teman seperjuangku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrol Pada Kantor Camat Kota Palembang”**

Adapun tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat Akademis sesuai kurikulum yang telah ditetapkan oleh Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti.

Dalam menyelesaikan Penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan Nikmat Ilmu dan Kesehatan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Edizal AE., M.S, selaku Rektor Universitas Tridinanti.
3. Ibu Dr. Msy. Mikial, SE.,M.Si.Ak.CA.CSRS selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti.
4. Ibu Meti Zuliyana, SE, M.Si, Ak. CA,CSRS selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Tridinanti.
5. Ibu Dr. Msy. Mikial, SE.,M.Si.Ak.CA.CSRS selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Riza Syahputera, SE. Ak.CA,CPAI,M.Ak selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia memberikan bimbingan, kritik, saran, dan pengarahan dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staff fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti.
7. Teruntuk kedua orang tua ku Bapak (Yasir) dan Emak ku (Yati) tercinta yang tak pernah lelah membesarkanku dengan penuh kasih sayang serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini sehingga penyelesaian skripsi ini berjalan dengan lancar.
8. Terima kasih untuk Mas ku (Mohammad Efendi) yang selalu mengisi hari-hariku dengan canda tawa, kasih sayangnya, perhatiannya, dan

semangatnya unuk memotivasi dan membantuku dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Terima kasih kepada para sahabatku yang ada pada grup ‘Calon Orang Sukses’ (Adel Mardilia, Aisyah Azzahra, Sintia Yuni, dan Yuni Mulia Fitri) yang telah memberikan semangat dan dukungan serta canda tawa yang sangat mengesankan dalam kata sahabat.
10. Teman-teman Mahasiswa/i Akuntansi Angkatan 2020 Universitas Tridinanti.
11. Semua pihak yang telah ikut membantu menyelesaikan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan laporan ini dikemudian hari. Akhirnya, hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa penulis berserah diri dan semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi para pembaca dan terutama bagi penulis sendiri.

Palembang, Maret 2024

Penulis

APITA OKTA PIANA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
RIWAYAT HIDUP	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Kajian Teoritis.....	12
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Teory</i>)	12
2.1.2 Transparansi	13
2.1.2.1 Pengertian Transparansi.....	13
2.1.2.2 Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	14
2.1.2.3 Indikator Transparansi	15
2.1.2.4 Dimensi Transparansi	16
2.1.2.5 Manfaat Transparansi	18
2.1.2.6 Prinsip Transparansi	18
2.1.2.7 Fungsi Prinsip Transparansi	19
2.1.2.8 Ciri Prinsip Transparansi	20
2.1.3 Aksesibilitas	21
2.1.3.1 Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah.....	21

2.1.3.2	Pengertian Laporan Keuangan.....	22
2.1.3.3	Indikator Aksesibilitas Laporan Keuangan	23
2.1.3.4	Manfaat Aksesibilitas laporan Keuangan Daerah.....	23
2.1.4	Akuntabilitas	24
2.1.4.1	Pengertian Akuntabilitas.....	24
2.1.4.2	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	25
2.1.4.3	Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	27
2.1.4.4	Tujuan Akuntabiitas.....	28
2.1.4.5	Prinsip Akuntabilitas	29
2.1.4.6	Tipe Akuntabilitas	29
2.1.4.7	Konsep Akuntabilitas.....	30
2.1.4.8	Fungsi Akuntabilitas	31
2.1.5	Akuntansi Akrual	31
2.1.5.1	Penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual	32
2.2	Penelitian Lain Yang Relevan.....	33
2.3	Kerangka Berpikir	37
2.4	Hipotesis Penelitian.....	39
BAB III	METODE PENELITIAN	40
3.1	Tempat dan Waktu Penelitian	40
3.1.1	Tempat Penelitian.....	40
3.1.2	Waktu Penelitian	40
3.2	Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	40
3.2.1	Sumber Data	40
3.2.2	Teknik Pengumpulan Data	41
3.3	Populasi, Sampel, Dan Sampling	42
3.3.1	Populasi	42
3.3.2	Sampel.....	42
3.3.3	Sampling	43
3.4	Rancangan Penelitian	44
3.5	Variabel dan Definisi Operasional	44
3.6	Instrumen Penelitian	47
3.7	Teknik Analisis	47

3.7.1 Uji Kualitas Data.....	48
3.7.1.1 Validitas.....	48
3.7.1.2 Reliabilitas.....	49
3.7.2 Uji Normalitas.....	49
3.7.3 Uji Asumsi Klasik.....	50
3.7.3.1 Uji Multikolinearitas.....	50
3.7.3.2 Uji Heteroskedastisitas.....	50
3.7.4 Uji Regresi Linear Berganda.....	51
3.7.5 Uji Hipotesis.....	52
3.7.5.1 Uji F (simultan).....	52
3.7.5.2 Uji t (Parsial).....	52
3.7.6 Uji Koefisien Determinasi.....	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	54
4.1 Hasil Penelitian.....	54
4.1.1 Sejarah Kantor Camat Kota Palembang.....	54
4.1.2 Struktur Organisasi Kantor Camat Kota Palembang.....	54
4.1.3 Gambaran Umum 8 Kantor Camat Kota Palembang.....	56
4.1.4 Data.....	58
4.1.4.1 Uji Kualitas Data.....	58
a. Uji Validitas.....	58
b. Uji Reliabilitas.....	61
4.1.4.2 Uji Persyaratan Analisis.....	62
a. Uji Normalitas.....	63
b. Uji Asumsi Klasik.....	65
1. Uji Multikolinearitas.....	65
2. Uji Heteroskedastisitas.....	66
4.1.5 Uji Regresi Linear Berganda.....	67
4.1.6 Uji Hipotesis.....	69
4.1.6.1 Uji F (Simultan).....	69
4.2.6.2 Uji t (Parsial).....	69
4.1.7 Uji Koefisien Determinasi.....	71
4.2 Pembahasan.....	71

4.2.1	Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.....	71
4.2.2	Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangn Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	73
4.2.3	Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.....	75
BAB V PENUTUP		77
5.1	Kesimpulan.....	77
5.2	Saran	77
DAFTAR PUSTAKA		79
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Anggaran dan Realisasi APBD Kota Palembang Tahun 2022	5
2.1 Penelitian Lain Yang Relevan.....	33
3.1 Jumlah Sampel	43
3.2 Variabel dan Definisi Operasional	44
4.1 Hasil Uji Validitas X1 Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah	58
4.2 Hasil Uji Validitas X2 Akuntabilitas	59
4.3 Hasil Uji Validitas Y Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	60
4.4 Hasil Uji Reliabilitas X1 Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah	61
4.5 Hasil Uji Reliabilitas X2 Akuntabilitas.....	61
4.6 Hasil Uji Reliabilitas Y Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	62
4.7 Hasil Uji Normalitas	63
4.8 Hasil Uji Multikolinieritas	65
4.9 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	67
4.10 Hasil Uji F (Simultan).....	69
4.11 Hasil Uji t (Parsial).....	70
4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi	72

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Berpikir	37
4.1 Struktur Organisasi Kantor Camat Kota Palembang	54
4.2 Grafik P-Plot Uji Normalitas	64
4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	66

ABSTRAK

Apita Okta Piana. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Dan Akuntabilitas Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis AkruaI Pada Kantor Camat Kota Palembang. (Dibawah bimbingan Ibu Dr. Msy. Mikial, SE.,M.Si.Ak.CA.CSRS dan Bapak Riza Syahputera, SE. Ak.CA,CPAI,M.Ak)

Pada dasarnya, skripsi ini membahas bagaimana pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah dan akuntabilitas terhadap transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara simultan dan parsial pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah dan akuntabilitas terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, dan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner di Kantor Camat Kota Palembang. Data diuji menggunakan regresi linear berganda. Hasil dari penelitian analisis regresi berganda: (1) secara simultan aksesibilitas laporan keuangan daerah dan akuntabilitas berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah, (2) secara parsial aksesibilitas laporan keuangan daerah dan akuntabilitas berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Aplikasi penelitian ini dimasa yang akan datang disarankan agar Kantor Camat Kota Palembang dapat menerapkan fitur media massa untuk memudahkan masyarakat dan meningkatkan aspek mengenai aksesibilitas laporan keuangan daerah, dan memaksimalkan penerapan akuntabilitas publik dalam penyusunan laporan keuangan dan untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain seperti penyajian laporan keuangan.

Kata kunci : Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRACT

Apita Okta Piana. *The Influence of Accessibility of Regional Financial Reports and Accountability on the Transparency of Accrual-Based Regional Financial Management at the Palembang City Subdistrict Office. (Under the guidance of Mrs. Dr. Mikial, SE.,M.Si.CA.CSRS and Mr. Riza Syahputera, SE. Ak.Ca,CPAI,M.Ak)*

Basically, this thesis discusses how the accessibility of regional financial reports and accountability influence transparency in regional financial management. The aim of this research is to determine simultaneously and partially the influence of regional financial report accessibility and accountability on the transparency of regional financial management.

The sampling technique used a purposive sampling method, and the data collection technique used a questionnaire at the Palembang City District Head Office. Data was tested using multiple linear regression. The results of the multiple regression analysis research: (1) simultaneously the accessibility of regional financial reports and accountability influence the transparency of regional financial management, (2) partially the accessibility of regional financial reports and accountability influence the transparency of regional financial management.

In the future, it is recommended that the Palembang City Subdistrict Office can apply mass media features to make it easier for the public and improve aspects regarding the accessibility of regional financial reports, and maximize the application of public accountability in preparing financial reports and for further research it is hoped that other variables can be added such as presentation financial reports.

Keywords: Accessibility of Regional Financial Reports, Accountability, and Transparency of Regional Financial Management

RIWAYAT HIDUP

Apita Okta Piana, dilahirkan di Tanjung Anom pada tanggal 13 Oktober 1999 dari Bapak M.yasir dan Ibu Yati, ia merupakan anak kedua dari dua bersaudara.

Sekolah Dasar diselesaikan pada tahun 2013 di SD Negeri 16 Tanjung Raja, Sekolah Menengah Pertama diselesaikan pada tahun 2016 di SMP Negeri 3 Tanjung Raja dan selanjutnya menyelesaikan Sekolah Menengah Atas pada tahun 2019 di SMA Negeri 1 Tanjung Raja. Pada tahun 2020, ia memasuki Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti.

Palembang, Maret 2024

Apita Okta Piana

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, maka kemajuan sistem keuangan modern atau proses akuntansi dan tata keuangan semakin mengalami perkembangan pula dalam sistemnya. Oleh karena itu institusi Pemerintahan harus memperbaiki kualitas kinerja keuangannya agar mampu mengikuti perkembangan akuntansi karena institusi Pemerintahan dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansinya kepada pengguna informasi keuangan.

Saat ini transparansi dan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah sudah menjadi isu serta sorotan dari banyak sekali pihak. Kebebasan politik sudah mendorong media massa untuk bebas memberitakan berbagai perkara serta peristiwa yang menyangkut keuangan pemerintah yang sebelumnya hampir tidak tersentuh oleh media massa. Perhatian terhadap isu transparansi pengelolaan keuangan yang berujung di tingkat akuntabilitas pemerintah semakin meningkat seiring dengan peningkatan sistem teknologi, informasi dan keterbukaan publik akhir-akhir ini.

Dalam pelaksanaan pemerintahan, pemerintah daerah wajib mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. Pemerintah harus dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (pusat dan daerah). Salah satu prasyarat untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan

melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan dimana pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik dalam rangka melaksanakan amanat rakyat.

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan (Lutfiyanti, 2018). Laporan keuangan daerah merupakan salah satu syarat pendukung terciptanya aksesibilitas dan akuntabilitas dalam keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan yang ada pada sektor publik. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Artinya, prinsip transparansi yaitu menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat dalam penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Dengan diterbitkannya peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang mengatur Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual dalam pencatatan serta pelaporan keuangan pemerintah maka Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 resmi dicabut mulai tahun 2015. PP No 71 tahun 2010 ini menyajikan laporan keuangan pemerintah sebanyak 7 (tujuh) laporan, yakni: laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Prinsip tepat waktu pada saat membuat laporan keuangan bergantung pada kinerja perangkat dalam menyusun serta menyampaikan pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah pada penerapan standar akuntansi berbasis akrual.

Tujuan laporan keuangan daerah adalah menyampaikan informasi yang berguna, jujur, dan relevan dalam rangka melaksanakan amanat rakyat.

Pemerintah daerah baik pemerintah provinsi juga kota/kabupaten mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan dan yang akan terjadi dalam pelaksanaan kegiatan dalam satu periode pelaporan untuk kepentingan aksesibilitas, akuntabilitas, dan transparansi laporan keuangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dinyatakan bahwa keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Permasalahan yang timbul adalah aksesibilitas dari laporan keuangan daerah yang tidak berjalan maksimal. Aksesibilitas adalah kemudahan bagi seseorang dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan pemerintah daerah aksesibilitas yang efektif tergantung pada akses publik terhadap laporan keuangan daerah yang dapat dibaca dan dipahami. Masyarakat sebagai pihak yang diberi amanah kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melaksanakan evaluasi terhadap pemerintah. Namun pada kenyataannya, masih sedikit pemerintah daerah yang memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapat informasi mengenai laporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah seolah ditutup-tutupi dan dirahasiakan dari masyarakat dan hanya bisa dijadikan konsumsi untuk kalangan tertentu. Pemerintah daerah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi

para pengguna laporan keuangan daerah bukan hanya pada lembaga legislatif tetapi juga pada masyarakat.

Informasi laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas jika pemerintah daerah terus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangan daerah, tetapi pada Kantor Camat Kot Palembang belum terealisasi tujuan dari laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang berguna bagi para pengguna. Publikasi laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lain nampaknya belum menjadi hal yang umum bagi sebagian daerah. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengabilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Tingkat Transparansi laporan keuangan pemerintah daerah Kota Palembang masih rendah. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia pada tahun 2022 Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Pagaralam, dan Kabupaten Ogan Ilir memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan. Hal ini sama dengan pemeriksaan laporan keuangan Kota Palembang yang juga memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia telah melaksanakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Palembang yaitu pada catatan atas laporan keuangan, Pemerintah Kota Palembang menyajikan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan hasil pemeriksaan atas

pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa terdapat penyimpangan dan ketidakefektifan yaitu usulan kegiatan tidak diverifikasi secara memadai dan pemaketan pekerjaan tidak memadai, pemilihan penyedia yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, pengawasan kegiatan yang tidak melibatkan konsultan sebagai pengawas eksternal dan kekurangan volume pekerjaan atas 211 paket pekerjaan. (Kepala BPK Perwakilan Sumsel Tahun 2023 dalam <https://sumsel.bpk.go.id/>)

Tabel 1.1
Anggaran dan Realisasi APBD Kota Palembang
Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Belanja			
Belanja operasi	3,179,100,781,389	2,785,816,059,728	87.63
Belanja pegawai	1,598,689,254,810	1,458,725,451,855	91.25
Belanja barang dan jasa	1,520,714,343,837	1,276,748,918,706.	83.96
Belanja bunga	6,320,151,086.	5,545,243,125.00	87.74
Belanja subsidi	7,695,000,000	855,000,000.00	11.11
Belanja hibah	45,682,031,656	43,941,446,042.00	96.19
Belanja modal	1,230,067,962,947	1,106,168,426,038.65	89.93
Belanja modal tanah	199,110,000	-	-
Belanja modal peralatan & mesin	117,287,710,742	103,796,803,421	88.50
Belanja gedung & bangunan	49,935,736,076	140,977,596,529	94.03
Belanja jalan, jaringan, dan irigasi	956,505,854,149	855,794,810,797	89.47

Belanja modal asset tetap lainnya	6,139,551,980	5,599,215,291	91.20
Belanja tidak terduga	65,789,739,600	1,479,003,036	2.25
Belanja tidak terduga	65,789,739,600	1,479,003,037	2.25
Jumlah belanja	4,474,958,483,936	3,893,463,488,803	87,01

Sumber : BPKAD Kota Palembang

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa anggaran yang ditetapkan dan direncanakan dalam pemanfaatan pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kota Palembang pada tahun 2022 dari Anggaran Belanja Pembangunan yang dialokasikan yaitu sebesar Rp.4.474.958.483.936,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.893.463.488.803,-

Permasalahan yang terjadi terkait aksesibilitas laporan keuangan yaitu akses yang disediakan sudah ada melalui *website* resmi yaitu Restra (rencana Strategi) tetapi data yang disajikan masih kurang lengkap seperti informasi-informasi dan kebijakan yang tidak bisa/belum di *publish*/disajikan seperti laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan yang kurang lengkap disajikan

Berdasarkan pada Restra informasi yang disajikan oleh Pemerintah Daerah belum di *publish* yang disebabkan oleh SIPKD (Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah) sebagai media aksesibilitas laporan keuangan belum sepenuhnya digunakan secara optimal sehingga laporan keuangan daerah belum dapat dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

Kantor Camat Kota Palembang sebagai salah satu instansi pemerintah daerah harus menyediakan semua informasi keuangan yang jujur dan terbuka kepada publik dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika Kantor Camat Kota Palembang dapat meningkatkan aksesibilitas laporan keuangan daerah maka akan berdampak dengan meningkatnya transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini karena adanya transparansi dan akuntabilitas maka masyarakat maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan laporan keuangan daerah tentu dapat melakukan pengawasan lebih leluasa. Sehingga hal ini akan memaksa pemerintah daerah untuk menyajikan laporan keuangan daerah secara jujur dan akurat.

Mardiasmo (2018:27) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principle) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, pada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana atas setiap pertanggungjawaban. Aksesibilitas yang baik akan mewujudkan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Hal inilah yang akan mewujudkan terciptanya akuntabilitas dan transparansi. Maka dari itu pemerintah daerah hendaknya dapat meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya dan memudahkan akses masyarakat untuk mengetahui serta memperoleh informasi dengan mudah. Pada demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media media, seperti surat kabar, televisi, dan

website serta lembaga yang memberikan perhatian langsung atau peran yang mendorong dalam terciptanya akuntabilitas bagi masyarakat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Octavia Lestari, 2023) menunjukkan bahwa aksesibilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap transparansi laporan keuangan daerah. Dan penelitian yang dilakukan (Yurani dan Sugeng, 2022) menunjukkan bahwa aksesibilitas berpengaruh negatif terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) menjelaskan bahwa akuntabilitas sebagai kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Kaitan akuntabilitas dengan pelaporan keuangan pemerintah yaitu pelaporan keuangan pemerintah merupakan media akuntabilitas publik yang berguna untuk mempertanggungjawabkan penggunaan pengelolaan sumber daya serta sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik. Dalam penelitian yang dilakukan (Asnaria Barus, 2020) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Dan penelitian yang dilakukan (Octavia Lestari, 2023) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap transparansi laporan keuangan daerah.

Dengan melihat fenomena dan juga berdasarkan temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan temuan yang berbeda, penulis tertarik untuk

mengambil judul penelitian tentang **”Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis AkruaI Pada Kantor Camat Kota Palembang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah aksesibilitas laporan keuangan daerah dan akuntabilitas berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual pada Kantor Camat Kota Palembang?
2. Apakah aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual pada Kantor Camat Kota Palembang?
3. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual pada Kantor Camat Kota Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah dan akuntabilitas terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual pada Kantor Camat Kota Palembang.

2. Untuk mengetahui pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual pada Kantor Camat Kota Palembang.
3. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual pada Kantor Camat Kota Palembang.

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai aksesibilitas laporan keuangan daerah dan akuntabilitas berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual.

2. Bagi pemerintahan Kantor Camat Kota Palembang

Sebagai bahan masukan pada Kantor Camat Kota Palembang mengenai aksesibilitas laporan keuangan daerah dan akuntabilitas berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual

3. Bagi penelitian lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan aksesibilitas laporan keuangan daerah dan akuntabilitas terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual.

DAFTAR PUSTAKA

- Barus, Asnaria, 2020, “*Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kantor Camat Namo Rambe Kab. Deli Serdang*”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area : Medan.
- Fajaruddin, 2021, “*Konsep Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*”, Seminar Nasional Teknologi dan Humaniora, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Fakultas Ekonomi Universits Tridinanti Palembang, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*, 2023.
- Halim, Abdul dan Muhammad Iqbal, 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Sekolah Tinggi Ilmu Manajmen : Yogyakarta.
- Irwati, et.al, “*Transparansi Pelayanan Publik dalam Administrasi Kependudukan di Kantor Kelurahan Labalawa Kecamatan Betoambari Kota Baubau*, Jurnal Kajian Ilmu Pemerintah, Oktober, 2022, Hal. 50-57.
- Karunia, R Luki dan Azas Mabur, 2023, *Akuntansi Pemerintah Konsep dan Praktik di Pemerintah Pusat dan Daerah*, Salembada Empat : Jakarta.
- Kasmir, 2019, *Analisis Laporan Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Kurniawan, Maria Magdalena Hesti, 2016, “*Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember*”, Fakultas Ekonomi Universitas Jember : Jember.
- Lestari, Octavia, 2023, “*Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Pangkalpinang*”, Universitas Bangka Belitung.
- Mikael edowai, et.al, 2021, *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Pusaka Almaida : Sulawesi Selatan.
- Napisah, Lilis Saidah dan Cecep Taufiqurachman, “*Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik dan Transparansi Di Kabupaten Bandung*”, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Juli, 2020, Vol. 6, No.2.
- Nurfadillah, Yurani dan Sugeng Santoso, “*Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar*”, Jurnal Akuntansi, Desember, 2022, Hal. 4.

- Pemerintah Indonesia, 2010, *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. Lembaga Negeri RI Tahun 2010 Nomor 123, Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sari, Embun Widya, “*Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu*”, Jurnal Online Mahasiswa, Februari, 2017, Vol. 4, No. 1.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Yuliani, Nur Laila, “*Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Aksesibilitas dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Hal. 1-14.

